

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, W. (2019). *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2015*. Retrieved from indonesia corruption watch: <https://antikorupsi.org/id/tren/tren-penindakan-kasus-korupsi-2015> (11 November 2019)
- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2019). *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2017*. Retrieved from indonesia corruption watch: <https://antikorupsi.org/id/tren/tren-penindakan-kasus-korupsi-2017> (11 November 2019)
- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2019). *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018*. Retrieved from indonesia corruption watch: <https://antikorupsi.org/id/tren/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018> (11 November 2019)
- Alfitra. (2017). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Retrieved from jdih bpk ri: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5/peraturan-bpk-no-1-tahun-2007> (12 November 2019)
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. Retrieved from badan pemeriksa keuangan republik indonesia: https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2019/I/ihps_i_2019_1568693769.pdf (11 November 2019)
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budding, C. F. (2017). The Effectiveness of BPKP Fraud Audit Finding on Determining the Level of Corruption in Indonesian Provinces. *Journal of Society and Governance – Volume 1 No.2 December*, 1-22.
- Cyndi Putri Permata Sari Sitorus, S. R. (2018). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia yang Disurvei oleh KPK di Tahun 2013). *e-Proceeding of Management : Vol.5, No.2 Agustus*, 2395-2401.
- Djoko Suhardjanto, M. S. (2018). Accountability and Corruption Level of Provincial Government in Indonesia. *Review of Integrative Business and*

Economics Research, Vol. 7, Supplementary Issue 3, ISSN: 2304-1013, 281-296.

- Fazlı YILDIZ, E. N. (2017). Budgetary Transparency, E-Government And Corruption: New Evidence From Panel Data Approach. *ECOFORUM Volume 6, Issue 1(10)*, 1-7.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Grimes, M. B. (2017). Transparency to curb corruption? Concepts, measures and empirical merit. *Springer Netherlands, Juli 2017, ISSN: 1573-0751*, 1-28.
- Hendri, F., & Alamsyah, W. (2019). *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2016*. Retrieved from indonesia corruption watch: <https://antikorupsi.org/id/tren/tren-penindakan-kasus-korupsi-2016> (12 November 2019)
- Heriningsih, S. (2014). Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia. *Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah, Volume 18, Nomor 2, September*, 29-36.
- Ikhwan, A. N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2016). The Influence Of Accountability On Clean-Corruption Perception In Local Government. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5, Nomor 2, Oktober*, 129-146.
- Indrawati, P. (2015). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi*. Bandung : Aditama.
- Jatim, D. K. (2019). *KABUPATEN / KOTA*. Retrieved from jatimprov.go.id (Media Jatim Menuju E-Government: <http://jatimprov.go.id/read/profil/kabupaten-kota> (12 November 2019)
- Jatim, D. K. (2019). *SEKILAS JAWA TIMUR*. Retrieved from jatimprov.go.id (Media Jatim Menuju E-Government: <http://jatimprov.go.id/read/profil/sekilas-jawa-timur> (12 November 2019)
- Khairudin, R. E. (2016). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 7, Nomor 2, September, ISSN: 2087-2054*, 137-154.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 3, Nomor 3, ISSN: 2337-3806*, 1-11.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maria Violeta Cimpoeru, V. C. (2015). Budgetary Transparency – an Improving Factor for Corruption Control and Economic Performance. *Procedia Economics and Finance* 27 (2015), ISSN: 2212-5671, 579-586.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, A. N. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.14. ISSN: 2302-8556, 1150-1182.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SC/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)*. Retrieved from http://transparansi.blitarkota.go.id/instruksi-188.52_1797_sj.pdf (12 November 2019)
- Nurul Husna, S. R. (2017). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2016). *e-Proceeding of Management : Vol.4, No.2 Agustus*, 1637-1642.
- Paramita, A., Tugiman, H., & Zultilisna, D. (2018). Pengaruh Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Tingkat Korupsi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. 1-12.
- Rahayuningtyas, D. P., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, ISSN: 2548-298X, 431-450.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Retrieved from dirjen perimbangan keuangan kemenkeu: http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-56-tahun-2005-tentang-sistem-informasi-keuangan-daerah/--232-267-PP56_2005.pdf (12 November 2019)
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Retrieved from jdih kemenkeu: <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/60TAHUN2008PP.HTM> (12 November 2019)
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Retrieved from dirjen perimbangan keuangan kemenkeu: <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf> (12 November 2019)

- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Retrieved from badan pemeriksa keuangan republik indonesia:
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2014/06/file_storage_1404095485.pdf (12 November 2019)
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Retrieved from dewan perwakilan rakyat republik indonesia: <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf> (12 November 2019)
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from jdih kemenkeu:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2001/20TAHUN2001UU.htm> (12 November 2019)
- Republik Indonesia. (2019). *UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Badan Pemeriksa Keuangan*. Retrieved from badan pemeriksa keuangan republik indonesia:
https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386158654.pdf (12 November 2019)
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 4(1)*, ISSN: 2355-9462, 73-90.
- Rubio, D. F. (2019). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018*. Retrieved from Transparency International:
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption_perceptions_index_2018 (12 November 2019)
- Rustiarini, N. W., & Novitasari, N. L. (2014). Persepsi Auditor Atas Tingkat Efektivitas Red Flags Untuk Mendeteksi Kecurangan . *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 5, Nomor 3, Malang, Desember*, ISSN: 2086-7603, 345-510.
- Salahudin, A. (2018). *Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saleh, L. I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Audit Pemerintah Pada Instansi Pemerintah Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 6, Nomor 1*, ISSN: 2337-3806, 1-13.
- Santoso, T. (2011). *Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Bogor Barat: Cifor.

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. J. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach Seventh Edition WileyPLUS Learning Space Card*. United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Sopannah, M. d. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI di Surabaya*.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (Vol. 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Edisi 4)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

(halaman ini sengaja dikosongkan)